



Desak DPRD Bentuk Panja

Terkait Hasil Laporan BPK

LAPORAN Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 menuai sorotan. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mendesak DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti LHP BPK RI.

Seperti diketahui, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7) lalu. "Apabila opininya WDP dan atau disclaimer, DPRD harus membentuk Panja," ujar Direktur KOPEL Indonesia Syamsuddin Alimiyah, kemarin (7/7).

Pria yang akrab disapa Syam itu mengatakan, perintah untuk segera membentuk Panja sudah sesuai dengan pasal 6, huruf (a) Permendagri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. Yakni pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, pada pasal 6 huruf (b) juga mengatur bahwa pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu. "Jadi tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak membentuk Panja, apalagi sampai menunda pembahasan," tegas Syam.

Melalui Panja, DPRD Jakarta diharapkan mengeluarkan rekomendasi berupa usulan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal temuan-temu-

TEMUAN BPK RI PADA ANGGARAN 2014

- Indikasi penggelembungan harga beli lahan untuk Rumah Sakit Kanker di eks RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat
- Nilai mencapai Rp 191 miliar
- Dinas Kesehatan DKI di tahun 2014, beli lahan seluas 6,9 hektar, senilai Rp 1,5 T
- Harga pembelian tanah dinilai kemahalan dibandingkan NJOP lahan di belakang lokasi

an di satuan kerja tertentu, yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

DPRD DKI Jakarta dituntut kritis dalam menilai hasil LHP ini. Misalnya, mempertanyakan Proyek UPS dan Proyek Scanner dan Print yang diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi. "Bahkan kasusnya saat ini sudah ditangani lembaga penegak hukum, sehingga pemeriksaan lanjutan penting untuk segera dilakukan karena selama ini telah menjadi sorotan masyarakat," ungkap Syam.

Selain itu, Syam juga mengingatkan DPRD DKI Jakarta agar proses pembahasan oleh Panja harus terbuka untuk umum dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. DPRD harusnya tampil sebagai aktor utama yang aktif untuk pemberantasan korupsi. Mengawal semangkat akuntabilitas dengan cara memastikan seluruh proses pembahasan kebijakan di DPRD transparan dan partisipatif.

Memastikan ada ruang warga untuk ikut berpartisipasi, memberi masukan saran

dan kritik atas sebuah kebijakan. "Bukan sebaliknya justru ikut menjadi pelaku korupsi dengan melindungi atau memelihara perilaku korupsi dengan menjauh dari aspirasi rakyatnya melalui rapat yang sengaja digelar tertutup," ungkap dia.

Dirinya juga menyayangkan, kinerja keuangan pemerintahan DKI Jakarta yang meraih WDP, bila dibandingkan dengan daerah lain yang justru terus berlomba meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Padahal seluruh faktor pendukung, dana, SDM dan lain-lainnya ada di Jakarta. "Harusnya mampu berkreasi memberi contoh pelaporan keuangan yang lebih akuntabel. Bukan sebaliknya lebih terbelakang," kritik Syam.

Pemerintahan seharusnya bertanggungjawab untuk mendesain lahirnya sebuah pemerintahan yang paling terbersih dan terdepan. "Pemerintahan itu adalah Gubernur dan DPRD sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tambah dia.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|

2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecewa dengan temuan BPK terkait indikasi penggelembungan harga beli lahan senilai Rp 191 miliar pada Rumah Sakit Kanker di bekas lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Temuan itu membuat pembangunan rumah sakit terancam batal.

Dia menjelaskan, pembelian lahan itu sudah berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Di sisi lain, BPK menemukan NJOP tanah di belakang rumah sakit yang lebih murah dibandingkan dengan lahan yang dibeli oleh DKI. Sehingga BPK menilai ada penggelembungan harga pembelian lahan tersebut.

Orang nomor satu di ibukota itu juga menyebut, BPK bersikeras memaksakan NJOP di RS Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang permukiman. Apabila BPK menemukan kejanggalan tersebut, Ahok mengimbau agar membawa perkara ini ke pihak kepolisian. Dengan demikian, akan diketahui apakah DKI sengaja menaikkan NJOP demi mencari keuntungan semata.

Ahok pun belum bisa memutuskan kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. "Sekarang mau enggak RS Sumber Waras kembalikan Rp 191 miliar, ya enggak mau dong," kata dia.

Kemudian jika lahan itu dibeli ulang, gubernur meyakini harga lahan tersebut akan lebih mahal dari sebelumnya. Karena NJOP meningkat tiap tahun dan harga lahan juga semakin mahal. Sementara pembelian lahan RS Sumber Waras sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. "Artinya apa, Anda ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau kami enggak jadi beli tanah itu, ya kami enggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," kata Ahok kesal. (wok)